



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



kehutanan.jambiprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Substansi dari Rencana Strategis ini sudah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi serta mengakomodir isu-isu aktual sektoral memperhatikan parameter-parameter strategis yang mempengaruhi kinerja institusi yang dianalisa sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga dapat mendukung visi Provinsi Jambi **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat menjadi acuan untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan perencanaan operasional oleh unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta menjadi ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kehutanan.

Akhir kata, semoga buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat memberi manfaat dan menjadi pedoman bagi yang berkepentingan.

Jambi, 2025
Pt. KEPALA DINAS,

H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP 197111292000031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulis	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan	12
2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.1.2 Sumber Daya	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan	36
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan	39
2.2.2 Isu Strategis	42
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	46
3.1. Tujuan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	46
3.2. Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	46
3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kehutanan Tahun 2025 – 2029	49
3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029	50
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
4.1. Uraian Program	53
4.2. Uraian Kegiatan	53
4.3. Uraian Sub kegiatan Kinerja, Indikator, Target, dan	



	Pagu Indikatif	69
4.4	Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	149
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Restra Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	152
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	153
BAB V	: PENUTUP	154



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkesinambungan. Dokumen ini disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang mengharuskan perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan tahunan.

Renstra ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan yang berkontribusi terhadap pencapaian visi Gubernur Jambi, yaitu: **Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT**

Dalam hal ini, Dinas Kehutanan memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan misi ketiga, yaitu: **"Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia."**

Provinsi Jambi memiliki kekayaan sumber daya hutan yang luas dan beragam, yang memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, mendukung ketahanan iklim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi seperti degradasi hutan, konflik tenurial, perubahan iklim, dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati menuntut adanya perencanaan strategis yang responsif dan adaptif.

Renstra ini juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan kehutanan periode sebelumnya, isu-isu strategis daerah, serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kehutanan. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan



berbasis bukti guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Dengan demikian, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan yang berdaya saing, profesional, dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, melalui program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari prespektif pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung Visi JAMBI MANTAP.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di ubah dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembar Negara Nomor 5608).



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 14. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lebaran Negara No.6757).
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 17. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).
 26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 27. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang



- Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ; P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019, Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);
39. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
40. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
41. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
42. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

Selain peraturan perundangan yang tertera di atas, penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi periode tahun 2025 – 2029 ini juga memperhatikan berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan, antara lain Indonesia's Forest and Other Land Used (FOLU) Net Sink 2030 yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional / Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dalam pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan gambaran dan sebagai acuan untuk mencapai sasaran lima tahun kedepan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan RI Tahun 2025-2029 dengan indikator capaian kinerja persentase peningkatan kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah, persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya, Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya, Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver, Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi periode tahun 2025 - 2029 adalah :

- Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029)

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi periode tahun 2025 - 2029 adalah :

- Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur terkait pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi setiap tahunnya.
- Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 – 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat daerah.

1.1.Latar Belakang

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, serta penentuan Isu-isu Strategis.

2.1 Gambaran Pelayanan;

2.1.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.2 Sumber Daya

2.1.3 Kinerja Pelayanan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis;

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan juga strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat daerah.

3.1. Tujuan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

3.2. Sasaran RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029.

3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

4.1. Uraian Program;

4.2. Uraian Kegiatan;

4.3. Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ;

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Restra Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).



BAB V : PENUTUP.

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

2.1. Gambaran Pelayanan

Sumberdaya hutan di masa lalu telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, sehingga sumber daya hutan cenderung dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung yang tersedia. Kenyataan tersebut semakin diperparah oleh pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan di luar kehutanan. Sementara itu terjadi pula akses kapasitas industri pengolahan kayu yang melebihi kemampuan ketersediaan bahan baku.

Mengingat kenyataan di atas maka pembangunan kehutanan ke depan harus dapat menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi sumber daya hutan dengan memperhatikan saling keterkaitan dan ketergantungan antara sumber daya hutan dengan masyarakat serta bersifat akomodatif dan partisipatif.

Dalam rangka pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari serta untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya dengan tidak merubah fungsi pokoknya. Untuk tercapainya tujuan pengelolaan tersebut diperlukan pengelolaan hutan yang profesional, partisipatif dan transparan yang meliputi kepastian kawasan hutan, keseimbangan pengelolaan kawasan hutan dan kepastian penegakan hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor **6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA2/10/2021** Tanggal 27 Oktober 2021, luas kawasan hutan di Provinsi Jambi sesuai dengan fungsi hutannya **2.124.352 ha** yang terdiri dari :

1. Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA) 714.088 Ha
2. Hutan Lindung (HL) 180.792 Ha

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 264.398 Ha |
| 4. Hutan Produksi (HP) | 954.012 Ha |
| 5. Hutan Produksi Konversi (HPK) | 11.062 Ha. |

Pemantapan kawasan hutan merupakan prinsip dasar dalam menyusun rencana makro untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, pemantapan kawasan hutan yang legitimasinya perlu diwujudkan secara optimal mengingat perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan sampai dengan saat ini terus mengalami berbagai permasalahan yaitu ketidakpastian status hukum kawasan hutan, deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung hal ini menyebabkan terjadinya percepatan kerusakan hutan.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dari tingkat tapak di wilayah kabupaten/kota Se Provinsi Jambi, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta untuk mendekatkan pelayanan di bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 12 Unit UPTD yang terdiri dari 11 unit UPTD KPHP dan 1 Unit UPTD Taman Hutan Raya (Tahura).

UPTD tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok:

***Melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kehutanan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di
bidang kehutanan***

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi
- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
- e. Melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan fungsinya.

- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD KPH dan UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) serta Jabatan Fungsional.
- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait dalam rangka mensukseskan program pembangunan Kehutanan;
- Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik dengan instansi daerah maupun pusat;
- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi Kehutanan, dan pengelolaan barang milik negara;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- Koordinasi rencana program dan anggaran
- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengelolaan data dan informasi Kehutanan
- Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan serta hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Program dan Evaluasi
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Asset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan (kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)) serta pemanfaatan hutan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:

- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan /atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi
- Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
- Penyiapan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah

provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK) dan izin koridor di wilayah provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di provinsi; dan
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Tata Hutan
- Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Hutan dan Pengembangan Investasi.

4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota sedangkan yang tidak lintas Kabupaten/Kota dikelola oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakkan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di provinsi.

Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Ketaatan Hukum terdiri dari :

- Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
- Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Seksi Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE.

5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan yang menjadi asset Pemerintah Provinsi Jambi, dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi

dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan dikawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi; dan
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
- Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, asset Pemerintah Provinsi Jambi (Taman Hutan Kenali dan Aset lainnya) yang ditugaskan Gubernur.
- Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam lainnya selain Wilayah kerja KPH.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL terdiri dari :

- Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL.

6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat :

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan adat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan

pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan.
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hutan adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
- Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik
- Penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik
- Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik,
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam , dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat dan Hutan Adat terdiri dari:

- Seksi Penyuluhan Kehutanan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Hutan Adat

7. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas:

- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
- b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi

8. UPTD**A. Taman Hutan Raya (TAHURA)**

UPTD Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai fungsi yaitu :

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah Unit TAHURA

- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA
- Pengembangan, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit TAHURA
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA dan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya terdiri dari:

- Kepala UPTD TAHURA
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan
- Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Perberdayaan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Resort

B. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL;

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan; dan
- Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD KPHP

Kepala UPTD KPHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
- Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
- Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis fungsional tertentu dan umum UPTD KPHP;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan protokoler, surat menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD KPHP;

- Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan administrasi perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan UPTD KPHP;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD KPHP;
- Penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan dan beban kerja UPTD KPHP;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi;

- Melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPTD KPHP;
- Melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek UPTD KPHP;
- Melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;

- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
- Melakukan penataan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- Melakukan pengelolaan data base KPHP dan KPHL;
- Menyusun rencana program dan kegiatan UPTD KPHP; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanakan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPHP dan KPHL;

- Pelaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan, rehabilitasi lahan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penanganan konflik sosial atau tenurial di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial dengan pemangku kepentingan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD KPHP.
- Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Resort

Resort dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang merupakan jabatan non struktural. Resort mempunyai tugas membantu kepala UPTD KPHP dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan di tingkat tapak dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Resort menyelenggarakan fungsi:

- Pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana prasarana kerja dan penindakan hukum di wilayah kerjanya;
- Pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan lingkungan;
- Penyelenggaraan tata hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan dan pengamanan hutan;
- Penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan;
- Pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat pemda setempat, instansi dan lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

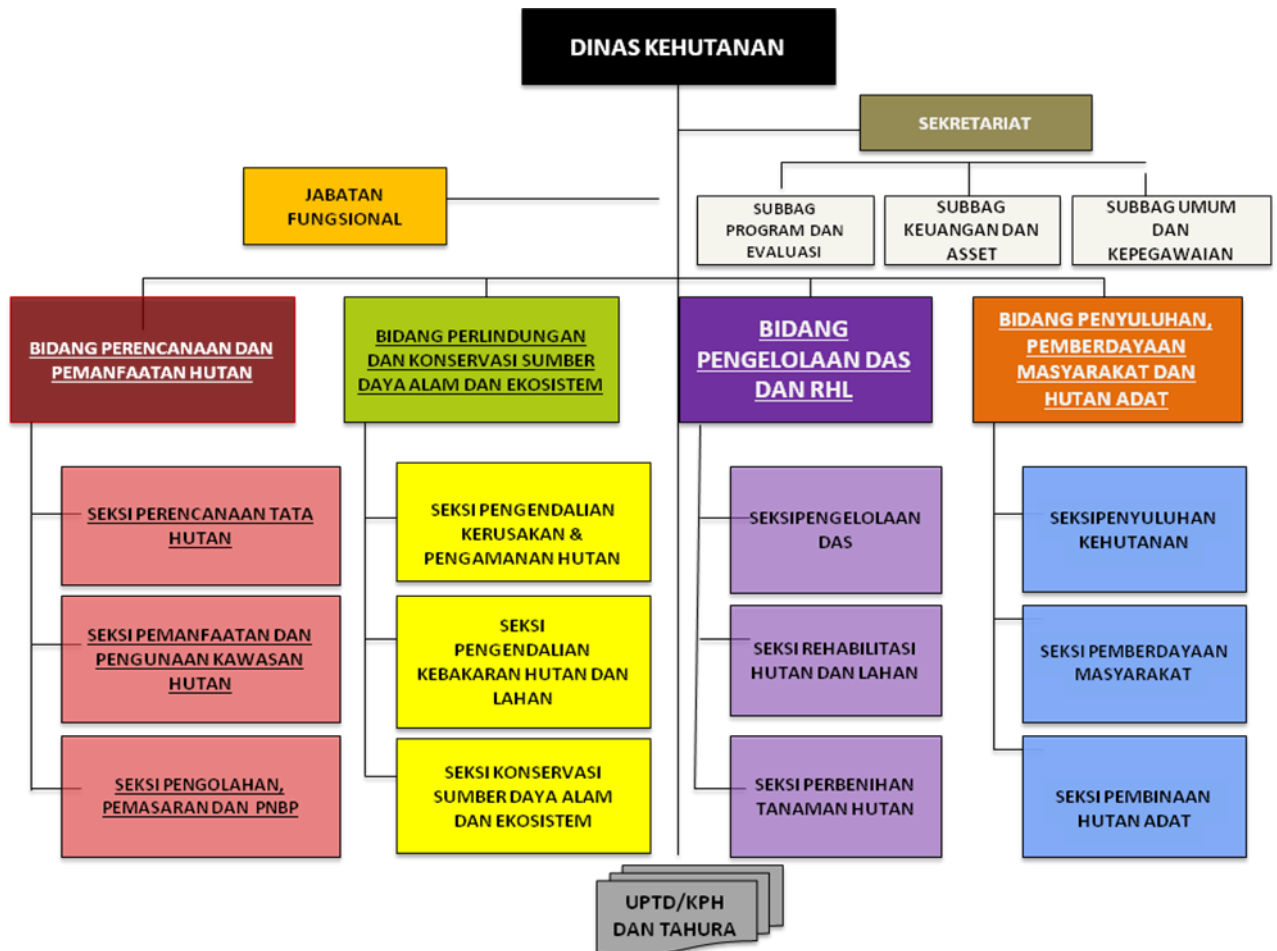
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017 dan 28 Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 12 Unit UPTD yang terdiri dari 11 Unit UPTD KPHP dan 1 Unit UPTD Tahura sebagai berikut :

- UPTD KPHP Kerinci Unit I
- UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI
- UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
- UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
- UPTDKPHP Tebo Barat Unit IX
- UPTD KPHP Tebo Timur Unit X



- UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
- UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
- UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
- UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
- UPTD TAHURA

a. Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang



Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi didukung sumber daya manusia yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Kehutanan) dan 11 UPTD KPHP dan 1 UPTD KPHP Tahura.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 291 orang dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Table 2.1
Rincian Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah (Org)
1	Dinas Kehutanan Provinsi	86
2	UPTD. Tahura	14
3	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	20
4	UPTD KPHP Batanghari Unit XI DAN XII	11
5	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	9
6	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	13
7	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	23
8	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	13
9	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	12
10	UPTD KPHP Limau Unit VII HULU Sarolangun	14
11	UPTD KPHP UNIT VIII Hilir Sarolangun	10
12	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V DAN VI	28
13	UPTD KPHP Kerinci UNIT I	38
	JUMLAH	291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Berdasarkan jenjang Pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (org)
1	Strata 2 atau Magister (S2)	30
2	Strata 1 (S1),	162
3	Diploma 3 (D3)	10
4	Diploma 4 (D4)	2
5	Setara pendidikan SLTA	86
6	SMP	1
	JUMLAH	291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 2.3 :

Tabel 2.3**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah (org)
1	Struktural	68
2	Fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT)	56
3	Fungsional Penyuluh Kehutanan	34
4	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	5
5	Fungsional Penata Laksana Barang	5
6	Fungsional Umum	123
	JUMLAH	291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 2.4 :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Golongan IV	34
2	Golongan III	222
3	Golongan II	30
4	Golongan 1	0
	JUMLAH	291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 2.5 :

Tabel 2.5

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – laki	216
2	Perempuan	75
	JUMLAH	291

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 2.6 :

Tabel 2.6

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Esselon

No	Esselon	Jumlah (org)
1	Esselon I	0
2	Esselon II A	1
3	Esselon III A	5
4	Esselon III B	12
5	Esselon IVA	51
6	Esselon IV B	0
	JUMLAH	69

Sebagai organisasi pelaksana kebijakan, pengatur administrasi, dan pengelola profesional perlu didukung SDM yang memiliki kompetensi baik manajerial, teknis maupun sosio-kultural. Kompetensi diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja teknis. Kompetensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam suku, agama, budaya sehingga yang bersangkutan akan memiliki wawasan kebangsaan yang baik.

Terkait dengan kompetensi manajerial dan teknis yang dimiliki sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Jambi, dalam upaya menunjang Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Perlindungan dan Pelestarian hutan di Provinsi Jambi. Dengan luas hutan yang sangat besar, jumlah polhut yang ada saat ini belum sebanding dengan kebutuhan. Satu hal yang perlu direncanakan menunjang manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir ASN serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional.

Sarana dan Prasarana/Aset

Sarana dan prasarana pada Dinas Kehutanan merujuk pada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses kerja, seperti ; perlengkapan kantor, kendaraan dinas, atau alat kerja lainnya. Sementara prasarana adalah fasilitas yang menunjang sarana, seperti ; bangunan/ruang kantor, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, yang diperlukan untuk mendukung kinerja perangkat daerah/ dinas kehutanan. Adapun rincian sarana dan prasarana/aset yang dimiliki antara lain:

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda 4	UNIT	18	7	25
2.	Kendaraan Roda 2	UNIT	100	27	127
3.	Kendaraan roda 3	UNIT	1	0	1
4.	Bangunan Kantor	UNIT	121	98	219
5.	Jaringan, saluran irigasi	UNIT	161	18	179
6.	Buku Perpustakaan	UNIT	0	4	4

1. **Gedung dan bangunan.**

Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan gedung tempat kerja yang difungsikan sebagai : bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi/pool, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya, gedung fasilitas umum, bangunan parkir, bangunan tempat tinggal.

2. **Peralatan dan inventarisasi Kantor.**

Terdapat berbagai peralatan kantor diantaranya Komputer, printer mesin fotocopy, meja kursi dan lemari arsip yang mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari. Semua aset dicatat dan dikelola secara tertib melalui sistem inventarisasi.

3. **Kendaraan/operasional**

Kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan untuk mendukung mobilitas pegawai dan kegiatan operasional lapangan.

4. **Sarana penunjang lainnya.**

Termasuk fasilitas jaringan internet, sistem keamanan (CCTV), perangkat audio-visual, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan sarana dan prasarana secara

bertahap selama periode lima tahun ke depan. Kebutuhan ini mempertimbangkan luas wilayah hutan Provinsi Jambi yang mencapai 2.124.352 hektar, kondisi geografis yang menantang, serta keterbatasan SDM dan peralatan saat ini. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi mencakup:

1. Sarana Mobilitas dan Operasional Lapangan.

- Penambahan kendaraan operasional (roda dan roda empat untuk menunjang patroli pengaman hutan, pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pendampingan perhutanan sosial.
- Kendaraan khusus medan berat (4WD) untuk menjangkau wilayah terpencil dan kawasan hutan lindung.

Alasan; Wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terletak pada kawasan hutan, daerah terpencil yang sulit dijangkau.

2. Sarana Pengawasan dan Pengaman Hutan.

- Peralatan patroli dan pengamanan seperti GPS, handy talky, kamera trap, drone.
- Sistem pemantauan berbasis teknologi digital (dashboard GIS, sistem informasi pemantauan kawasan hutan.

Alasan ; dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan berbasis bukti dan pengumpulan data lapangan secara real-time, mengingat jumlah Polhut sangat terbatas.

3. Peralatan Rehabilitasi hutan / lahan dan Agroforestry. Sarana Pendukung pengelolaan Perhutanan Sosial dan HHBK.

- Peralatan pembibitan, alat tanam dan pemeliharaan.
- Termasuk kendaraan roda 4 dan 2

Alasan ; mendukung percepatan rehabilitasi lahan kritis dan program penghijauan DAS .

4. Perangkat teknologi dan pengelolaan data kehutanan.

- Komputer, server dan perangkat lunak pemetaan (GIS) dan pemutakhiran data tutupan hutan
- Sistem digitalisasi.

Alasan ; mendorong efesiensi pelayanan, akurasi perencanaan dan transparansi pengelolaan kehutanan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode lima tahun terakhir, Dinas Kehutanan Provinsi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan hutan. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja SKPD sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026, sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sudah terlaksana. Berikut disampaikan gambaran kinerja /pencapaian kinerja Dinas Kehutanan tahun 2020 – 2024 dan evaluasi Indikator kinerja pelayanan tahun 2021 – 2026.



Tabel.2 ; Pencapaian kinerja tahun 2020 – 2024.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	%	80,00	80,68	81,22%	81.61 %	81,87%	0,85%	0,67%	0,48%	0,32%	0,58%
2.	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara optimal	%	8%	13%	15,63%	21,58%	28%	62,50%	20,23%	38,07%	29,75	37,64%
3.	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dana bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	%	0,20	0,21	0,25	0,28%	0,21%	5%	19,05%	12%	25%	2,76%
4.	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	%	4,5%	8,27%	12,78 %	13,53%	17,29%	83,78%	54,53%	5,87%	27.79%	42,99%
5.	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	%	1,30%	1,45%	1,69%	1,92%	2,13%	11,54%	16,55	13,61%	10,94%	13,16%
6	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	%	1,57%	0	0,77%	0.90%	0,71%	0	0	16,88	21,11%	2,11%



Tabel 2. : Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Prangkat Daerah Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun ke					Persentase Capaian Pada Tahun ke (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Indikator Tujuan																
1.	Meningkatkan pengelolaan Kawasan hutan																
B.	Indikator Sasaran																
1	Meningkatkannya Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan																
C.	Indikator Program																
1	Persentase Peningkatan Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya	Persen	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,54%	0,39%	0,60%	-	-	270,10%	195,00%	298,34%	-	-
2	Persentase Luas Izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal	Persen	15%	20%	26%	38%	44%	15,63%	21,58%	28,00%	-	-	104,23%	107,90%	107,69%	-	-
3	Persentase Lembaga Pengelolaan DAS yang dibentuk	Persen	12,78%	12,00%	15,78%	19,54%	23,30%	12,78%	13,53%	17,29%	-	-	100,02%	112,75%	109,59%	-	-
4	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan dari Retribusi dan Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah	Persen	0,25%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,25%	0,28%	0,21%	-	-	100,00%	140,00%	105,00%	-	-
5	Persentase Penurunan Lahan Kritis melalui Rehabilitasi	Persen	1,46%	1,58%	1,71%	1,85%	1,99%	1,69%	1,92%	2,13%	-	-	115,75%	121,52%	124,62%	-	-
6	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	Persen	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	1,51%	1,397%	1,32%	-	-	182,25%	168,28%	159,32%	-	-

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Kehutanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Kehutanan sangat beragam, mencakup masyarakat luas yang terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian hutan. Secara umum, kelompok sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang hidup sekitar hutan ;
Warga yang terlibat dalam perhutanan sosial dan kelompok tani hutan.
2. Pemangku kepentingan kehutanan yang terdiri dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ; Lembaga yang berperan dalam kampanye konservasi, penelitian kehutanan, pemberdayaan masyarakat terkait kehutanan.
4. Pengguna Hutan yang terdiri dari Industri kayu, wisata alam, pengguna air.
5. Lembaga terkait Kehutanan yang terdiri dari ; Perguruan tinggi, Pusat penelitian dan Kementerian Kehutanan.
6. Individu yang memperhatikan lingkungan yang terdiri dari konservasionis, peneliti dan publik yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan ditingkat tapak/lapangan sekarang ini dilaksanakan oleh 11 Unit UPTD KPHP dan 1 UPTD Tahura yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Permasalahan kehutanan di provinsi Jambi sangat kompleks dan beragam, meliputi deforestasi, penebangan liar, kebakaran hutan dan eksploitasi sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan. Faktor-faktor seperti konversi hutan untuk perkebunan, pertanian, pertambangan, kurangnya penegakan hukum, dan konflik masyarakat lokal dengan perusahaan juga menjadi pemicu masalah.

Lebih detailnya, permasalahan Kehutanan di Provinsi Jambi mencakup :

1. Sumber daya manusia.

Masalah sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mencakup kekurangan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, ketidaksesuaian kompetensi. Ini akan berimplikasi pada aktivitas pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Jambi. (Adapun jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 30 Maret 2025 adalah 291 orang sementara luas hutan provinsi Jambi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, luas kawasan hutan di Provinsi Jambi sesuai dengan fungsinya 2.124.352 ha)

2. Deforestasi dan Alih fungsi lahan :

Konversi hutan menjadi perkebunan : pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama kelapa sawit menjadi faktor utama berkurangnya luas hutan, serta pembukaan lahan untuk pertanian guna meningkatkan kebutuhan pangan juga mendorong konversi hutan menjadi lahan pertanian.

3. Penebangan Liar (Illegal Logging)

Penebangan tanpa izin merupakan aktivitas penebangan liar yang tidak terkendali sangat merusak hutan dan menyebabkan hilangnya

keanekaragaman hayati. Serta kurangnya pengawasan dikarenakan Keterbatasan tenaga pengamanan hutan yaitu Polisi Hutan sehingga, penebangan liar mudah terjadi.

4. Kebakaran hutan :

Pembakaran lahan : pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan seringkali tidak terkendali dan menyebabkan kebakaran hutan yang meluas. Kemarau panjang dan fenomena EL Nino juga dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan.

5. Eksploitasi Sumber daya hutan yang tidak lestari :

Penambangan; Eksploitasi Sumber daya mineral di kawasan hutan tanpa izin dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Serta pengambilan kayu yang berlebihan dan tidak berkelanjutan baik untuk keperluan industri maupun pemukiman dapat merusak ekosistem hutan.

6. Konflik tenurial dan hak masyarakat adat.

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang mengelola hutan sering terjadi, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat lokal atas lahan dan sumber daya hutan.

7. Perubahan Iklim:

Peningkatan suhu:

Peningkatan suhu akibat perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan.

Perubahan pola hujan:

Perubahan pola hujan juga dapat mengganggu pertumbuhan hutan dan menyebabkan degradasi kualitas hutan.

8. Kurangnya penegakan hukum :

Rasio Ideal : Kajian kebutuhan petugas pengamanan hutan tahun 2013 menunjukkan bahwa rasio ideal Polhut terhadap luas kawasan hutan adalah 1 : 5000. Jumlah polhut pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi saat ini adalah sebanyak 56 orang sedangkan luas kawasan hutan Provinsi Jambi adalah 2.124.352 Ha. Maka dibutuhkan sekitar 424 orang Polhut untuk mengamankan hutan secara optimal. (Masih

jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pengaman hutan yang optimal)

Sanksi yang lemah:

Sanksi yang ringan atau tidak efektif untuk pelaku kejahatan kehutanan juga menjadi masalah, karena tidak dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029 meliputi Degradasi Lingkungan, Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kemiskinan, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis bidang kehutanan tahun 2025 – 2029, dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penguatan Ekonomi Wilayah melalui Pemanfaatan Hutan : Memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Serta mendorong pengembangan usaha kecil menengah (UKM) berbasis hutan seperti : produksi kerajinan, produk kehutanan non kayu dan pariwisata alam. Dan melakukan diservikasi produk kehutanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal.
2. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan : mencegah dan mengatasi deforestasi dan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. meningkatnya kualitas dan produktivitas hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Guna menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dengan membuka akses dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).



4. Pengelolaan Sumber daya alam, dan Tata Kelola Kehutanan yang akuntabel yaitu : Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan untuk memastikan pengelolaan yang optimal. Menerapkan teknologi informasi geospasial untuk mendukung pengelolaan hutan yang efisien dan efektif. Meningkatkan Kerjasama antar lembaga dan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya hutan. minimnya kelembagaan dalam pengelolaan hutan antara lain kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan dan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).



Tabel : 2.1 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Luas Kawasan Hutan yang signifikan 2. Potensi Pengembangan perhutanan social. 3. Potensi Hasil hutan bukan kayu (HHBK yang kaya dan bernilai ekonomi. (Gaharu, madu hutan, jernang, getah damar, jelutong, buah-buahan hutan) 4. Potensi Ekowisata, wisata alam, jasa lingkungan. 5. Potensi Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. (RHL, Penghijauan DAS, Agroforestry/wana tani.) 6. Pengembangan Hutan Rakyat dan hutan tanaman. (HR, HTI). Dengan cara memfasilitasi penguatan kelembagaan petani hutan dan pengembangan usaha berbasis kehutanan.	1. Deforestasi dan alih fungsi Lahan 2. Penebangan Liar 3. Kebakaran hutan 4. Eksploitasi Sumber daya hutan yang tidak Lestari. 5. Konflik tenurial dan hak masyarakat adat. 6. Perubahan iklim. 7. Kurangnya penegakan hukum.	1. Degradasi Lingkungan 2. Perubahan iklim 3. Keanekaragaman hayati 4. Kemiskinan. 5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 6. Kesejahteraan Masyarakat Lokal 7. Pengelolaan Kawasan Hutan 8. Perlindungan Lahan dan Tanah	Perubahan iklim, Cuaca ekstrim, pemanasan global (Perjanjian Paris untuk membatasi Pemanasan Global hingga 1,5°C)	Krisis Lingkungan : (triple planetary crisis) yaitu : Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan ;lingkungan. ekonomi hijau, degradasi hutan dan deforestasi.	Deforestasi wilayah di wilayah tropis. Kerusakan hutan dan lahan. Penurunan keanekaragaman hayati.	1. Penguatan Ekonomi Wilayah melalui Pemanfaatan Hutan; 2. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan; 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Sumber Daya Hutan; serta 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Tata Kelola Kehutanan



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Potensi Sinergi Kemitraan dan pendanaan Non APBD. (potensi Kerjasama dengan sektor swasta dan Lembaga donor. Dan difokuskan pada rehabilitasi hutan, program karbon dan jasa lingkungan, pengembangan perhutanan social, sertifikasi pengelolaan hutan Lestari. (PHPL, SVLK)						
8. Potensi Pengembangan Sistem informasi dan inovasi Digitl kehutanan.						

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan pembangunan daerah, Perangkat Daerah menetapkan tujuan strategis sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Tujuan ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap berbagai program dan kegiatan, serta memastikan sinergi antara kebijakan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuan Perangkat Daerah mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam periode perencanaan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahunan. Penetapan tujuan juga mempertimbangkan isu-isu strategis yang relevan, kondisi eksisting, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan atau memperhatikan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, maka Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2025 – 2029 adalah : **“Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan”** dengan **Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan**.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra PD adalah Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menetapkan, merumuskan sejumlah sasaran yang lebih operasional dan terukur.

Sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya.



3. Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal oleh Masyarakat Dalam Pengelolaan potensi Hutan dan persetujuan Perhutanan Sosial.
4. Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS).



Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kehutanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kinerja pada awal periode 2024	Target Tahun						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)								
Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan								
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan	1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
			2. Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	4,12	4,14	4,16	4,18	4,20	4,22	4,24	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi Pembangunan provinsi, karena pada dasarnya Pembangunan provinsi merupakan akumulasi dari Pembangunan daerah.

Adapun rumusan strategi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang relevan adalah sebagai berikut:

Strategi 1 :

Pengelolaan hutan berkelanjutan. (sustainable forest management).

Adalah Pendekatan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dan manfaat jangka panjang bagi manusia dan alam. Intinya, pengelolaan hutan ini bertujuan menjaga hutan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Tujuan Utama Pengelolaan hutan berkelanjutan adalah : untuk memastikan bahwa hutan dapat terus memberikan manfaat, baik dari segi ekologis (misalnya menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem) maupun ekonomis (misalnya produksi kayu dan non-kayu).

Strategi 2 :

Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya.

Tujuan utamanya adalah untuk dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dan dapat dilakukan dengan ; perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Strategi 3 :**Peningkatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Peningkatan kapasitas/kemandirian Masyarakat di Bidang Kehutanan.**

Tujuan Pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, sehingga masyarakat mampu mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Strategi 4 :**Peningkatan dan Pemantapan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu strategi penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, ketahanan air, dan pengendalian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola DAS secara terpadu, partisipatif, dan berbasis pada daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan hulu-hilir yang mencakup perlindungan kawasan hutan di bagian hulu, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, konservasi tanah dan air, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian fungsi DAS. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah : Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025-2029.



Tabel 3.5 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1		Meningkatkan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat	1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.	
		Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan	2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).	
		Mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat	3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
		Meningkatkan kualitas dan kelestarian sungai	4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
			5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
			6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
			7. Perbenihan Tanaman Hutan	
			8. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran	



			(Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 9. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 10. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. 11. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Merestorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan serta telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yaitu :

A. Program

1. Pengelolaan Hutan
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

B. Kegiatan

Dengan merujuk pada Program pembangunan kehutanan tersebut, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merumuskan kegiatan teknis Bidang Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
7. Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi
8. Perbenihan Tanaman Hutan



9. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
10. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
11. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
12. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Meningkatnya Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
				Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	
				Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan KPH.	
				Tersedianya Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	
				Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP	Dokumen RKTP yang disahkan	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	
				Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Telaksananya kegiatan	Jumlah	Fasilitasi kegiatan	



				pembangunan dan pengembangan KPH	kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	pembangunan dan pengembangan KPH	
				Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	
				Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penatagunaan kawasan hutan	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutanerlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penatagunaan kawasan hutan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan	
				Meningkatnya Rencana Pengelolaan KPH kecuali pada KPHK		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
				Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
				Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	
				Tersusunnya Peta Perubahan Tata Hutan	Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan	
				Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Peta	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan	
				Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	
				Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	



				Meningkatnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
				Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	
				Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	
				Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	
				Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	
				Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	
				Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Pelaksanaan	



				Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	
				Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
				Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	
				Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
				Terlaksananya Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	



				Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang direhabilitasi	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
				Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Pembangunan Sumur resapan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	
				Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Pembangunan gully plug	
				Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Pembangunan Dam Penahan	
				Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
				Tercegahnya Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tidak muncul di SIPD 2024-2025
				Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	
				Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan / Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
				Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
				Terlaksananya	Jumlah operasi	Koordinasi,	



				Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
				Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
				Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
				Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Skala kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	
				Terpenuhinya Hak Akses SI- RPBBPHH bagi PBPHHHHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	
				Terpenuhinya hak akses SIRPBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Fasilitasi Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK)	



						dan Pasarak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000M3/Tahun		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
				Terselaksananya Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
				Terlaksananya	Jumlah Permohonan	Fasilitasi Pemenuhan	



				Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutan berupa pengenaan Sanksi Administrasi	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
						Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	
				Terlaksananya Fasilitasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK yang difasilitasi	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Tidak masuk dalam perencanaan
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah	Tidak masuk dalam perencanaan



				Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian	Jumlah Laporan kegiatan pengawasan KHDTK	dan Wisata Rohani Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK	Tidak masuk dalam perencanaan
				Terlaksananya fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK yang difasilitasi	Perencanaan pengelolaan KHDTK	Tidak masuk dalam perencanaan
				Meningkatnya Perlaksanaan Perbenihan Tanaman Hutan		Perbenihan Tanaman Hutan	
				Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	
				Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikasi Sumber Benih	
				Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikasi Mutu Benih	
				Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikasi Mutu Bibit	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
				Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Pembangunan Sumber Benih	
				Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	



				Terlaksananya Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Pengelolaan Sumber Benih	
				Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
		Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		Indeks Keanekaragaman Hayati	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
				Meningkatnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
				Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara	Jumlah Perjanjian Kerja Sama	Kerja Sama Penyelenggaraan	



				Tahura Provinsi	Penyelenggaraan Tahura Provinsi	TAHURA Provinsi	
				Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	
				Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	
				Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	
				Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	
				Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	
				Pelaksanaan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	Penataan kawasan Tahura Provinsi	
				Meningkatnya Perlindungan Tumbuhan dan Staw Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak amsuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convension On		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On	



				International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
				Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	
				Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	
				Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	
				Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	



				Meningkatnya nilai efektivitas pengelolaan koridor hidupan liar	Luas koridor hidupan liar yang dikelola	Pengelolaan koridor hidupan liar	
				Terlaksananya penetapan koridor hidupan liar satwa	dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati multipihak	Penetapan koridor hidupan liar	
				Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	
		Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal oleh Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Hutan dan Persetujuan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (KTH Madya)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
					Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Menuju Silver)		
				Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
				Terlaksananya Penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
	T1		T1	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		S1.1		Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	



				Sosial			
			OC1.1.1	Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
				Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Penyiapan Perhutanan Sosial	
		Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)		Peningkatan Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (Peningkatan Tutupan Lahan Kritis)	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
				Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
				Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
				Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
				Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				88.608.446.856		86.000.000.000		88.240.000.000		90.460.000.000		92.650.000.000		
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				57.200.000.000		57.700.000.000		58.200.000.000		58.700.000.000		59.200.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	56.480.000.000	88	56.980.000.000	88.5	57.480.000.000	90	57.980.000.000	90.5	58.480.000.000	Dinas Kehutanan	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		Dinas Kehutanan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				52.420.000.000		52.920.000.000		53.420.000.000		53.920.000.000		54.420.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	300	51.500.000.000	300	52.000.000.000	300	52.500.000.000	300	53.000.000.000	300	53.500.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				51.500.000.000		52.000.000.000		52.500.000.000		53.000.000.000		53.500.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	300	51.500.000.000	300	52.000.000.000	300	52.500.000.000	300	53.000.000.000	300	53.500.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	19	200.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Persentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	Dinas Kehutanan	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	27	72	60.000.000	74	60.000.000	76	60.000.000	78	60.000.000	80	60.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5		88		88.5		90		90.5		UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	60.000.000	88	60.000.000	88.5	60.000.000	90	60.000.000	90.5	60.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Hasil Movev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Presentase Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72	60.000.000	74	60.000.000	76	60.000.000	78	60.000.000	80	60.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5		88		88.5		90		90.5		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	60.000.000	88	60.000.000	88.5	60.000.000	90	60.000.000	90.5	60.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Hasil Movev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77	60.000.000	77.5	60.000.000	78	60.000.000	79	60.000.000	80	60.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Hasil Movev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5		88		88.5		90		90.5		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72	60.000.000	74	60.000.000	76	60.000.000	78	60.000.000	80	60.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5		88		88.5		90		90.5		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	60.000.000	88	60.000.000	88.5	60.000.000	90	60.000.000	90.5	60.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Hasil Movev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Movev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72	60.000.000	74	60.000.000	76	60.000.000	78	60.000.000	80	60.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5		88		88.5		90		90.5		UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan Xii	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan XII	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan XII	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan XII	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan XII	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit Xi dan XII	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	60.000.000	88	60.000.000	88.5	60.000.000	90	60.000.000	90.5	60.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	60.000.000	88	60.000.000	88.5	60.000.000	90	60.000.000	90.5	60.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Hasil Movev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5	60.000.000	88	60.000.000	88.5	60.000.000	90	60.000.000	90.5	60.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77		77.5		78		79		80		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		79		80		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.42	77	60.000.000	77.5	60.000.000	78	60.000.000	79	60.000.000	80	60.000.000	UPTD Tahura	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	25	72		74		76		78		80		UPTD Tahura	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87.5		88		88.5		90		90.5		UPTD Tahura	
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	UPTD Tahura	
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD Tahura	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD Tahura	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD Tahura	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD Tahura	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD Tahura	
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	UPTD Tahura	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	UPTD Tahura	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD Tahura	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	UPTD Tahura	
3.28.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	UPTD Tahura	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	UPTD Tahura	
3.28.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	UPTD Tahura	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-		-		-		-	UPTD Tahura	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	UPTD Tahura	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	UPTD Tahura	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	UPTD Tahura	
Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD Tahura	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD Tahura	
3.28.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	UPTD Tahura	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	UPTD Tahura	
3.28.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	UPTD Tahura	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	UPTD Tahura	
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				24.048.962.000		19.000.000.000		20.000.000.000		21.000.000.000		22.000.000.000		
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	7.548.962.000	0.216	5.250.000.000	0.218	6.250.000.000	0.22	7.250.000.000	0.222	8.250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				1.400.000.000		905.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	Dinas Kehutanan	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah laporan nilai PNPB dari pemanfaatan hutan di KPHL/P	2	2	1.000.000.000	2	505.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.03.0010 - Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kehutanan	
Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi yang Disahkan	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.03.0014 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P				1.000.000.000		505.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNPB dari pemanfaatan hutan di wilayah KPHL/P	2	2	1.000.000.000	2	505.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				670.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	Dinas Kehutanan	
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12	12	400.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	Dinas Kehutanan	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	Dinas Kehutanan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				400.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12	12	400.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				3.753.962.000		2.400.000.000		2.805.000.000		3.805.000.000		4.805.000.000	Dinas Kehutanan	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	3.353.962.000	12	2.000.000.000	12	2.405.000.000	12	3.405.000.000	12	4.405.000.000	Dinas Kehutanan	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				3.353.962.000		2.000.000.000		2.405.000.000		3.405.000.000		4.405.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	3.353.962.000	12	2.000.000.000	12	2.405.000.000	12	3.405.000.000	12	4.405.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kehutanan	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	2000	400.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &6000 m3/Tahun	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kehutanan	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09 - Perbenihan Tanaman Hutan				725.000.000		525.000.000		725.000.000		725.000.000		725.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	3000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	2	2	300.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Dinas Kehutanan	
	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5	5	200.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09.0002 - Sertifikasi Sumber Benih				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09.0003 - Sertifikasi Mutu Benih				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09.0004 - Sertifikasi Mutu Bibit				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09.0005 - Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				300.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kehutanan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	2	2	300.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09.0006 - Pembangunan Sumber Benih				200.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5	5	200.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.03.1.09.0007 - Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kehutanan	
Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	3000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	3000	150.000.000	Dinas Kehutanan	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi			60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi			60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	190.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	190.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlanjutnya berupa peneanaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2	2	110.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2	2	110.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang BPBPH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	190.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	190.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi & 6000m3/Tahun	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Penyusunan Dokumen Pelaksanan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				700.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	1000	200.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Tercegahnnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	1000	200.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	2	90.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/utnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				90.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	2	90.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/utnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	2	190.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	2	190.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &6000m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/utnya berupa pengenaan Sanksi Admsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/utnya berupa pengenaan Sanksi Admsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				700.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Tercegaahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang BPBHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang BPBHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Laporan kegiatan Pengendalian BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/utnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				90.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	10	190.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kayu (HHBK)														
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	10	190.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				700.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang BPBHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang BPBHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Laporan kegiatan Pengendalian BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				90.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Pengendalian BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				700.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				90.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				700.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	200.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	150.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2	2	90.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				90.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2	2	90.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	2	2	190.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	2	2	190.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminstratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0.21	0.214	1.500.000.000	0.216	1.250.000.000	0.218	1.250.000.000	0.22	1.250.000.000	0.222	1.250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Penyusunan Dokumen terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.03.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.04.0002 - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				750.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Tercegaahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	2000	250.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.06 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	190.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.06.0008 - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				190.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	190.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengndalian Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi & 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.03.1.07.0005 - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif			-		-		-		-		-	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan				-		-		-		-		-	UPTD Tahura	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				2.700.000.000		2.900.000.000		3.100.000.000		3.300.000.000		3.450.000.000		
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	81.87	81.887	1.500.000.000	81.896	1.700.000.000	81.905	1.700.000.000	81.914	1.800.000.000	81.922	1.950.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.04.1.02 - Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2	2	400.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.04.1.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2	2	400.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				1.100.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	50	50	550.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	650.000.000	50	650.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60	60	550.000.000	60	600.000.000	60	600.000.000	60	650.000.000	60	700.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.04.1.03.0005 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				550.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	Dinas Kehutanan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60	60	550.000.000	60	600.000.000	60	600.000.000	60	650.000.000	60	700.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.04.1.03.0006 - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				550.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	50	50	550.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	650.000.000	50	650.000.000	Dinas Kehutanan	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
													UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
													UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
													UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
													UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
													UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
													UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
													UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
													UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
													UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
													UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	81.87	81.887		81.896		81.905		81.914		81.922		UPTD Tahura	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.28.04.1.01 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi				1.200.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	UPTD Tahura	
Dokumen Konservasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	18	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	UPTD Tahura	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	UPTD Tahura	
	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	1000	1000	500.000.000	1000	500.000.000	1000	600.000.000	1000	600.000.000	1000	600.000.000	UPTD Tahura	
	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	UPTD Tahura	
3.28.04.1.01.0011 - Perencanaan Pengelolaan TAHURA				200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD Tahura	
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	UPTD Tahura	
3.28.04.1.01.0014 - Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD Tahura	
Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	18	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	UPTD Tahura	
3.28.04.1.01.0015 - Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				500.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	UPTD Tahura	
Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	1000	1000	500.000.000	1000	500.000.000	1000	600.000.000	1000	600.000.000	1000	600.000.000	UPTD Tahura	
3.28.04.1.01.0016 - Penataan kawasan Tahura Provinsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD Tahura	
Pelaksanaan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	UPTD Tahura	
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				4.384.941.906		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		7.500.000.000		
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	1.084.941.906	26.52	1.050.000.000	29.54	1.000.000.000	32.57	1.500.000.000	35.61	2.000.000.000	Dinas Kehutanan	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		Dinas Kehutanan	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				1.084.941.906		1.050.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	Dinas Kehutanan	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial				-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Dinas Kehutanan	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	35	35	250.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	400.000.000	Dinas Kehutanan	
				-		-		-		-		-	Dinas Kehutanan	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1	1	434.941.906	1	400.000.000	1	300.000.000	1	650.000.000	1	1.000.000.000	Dinas Kehutanan	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	250.000.000	1000	300.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	35	35	250.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	400.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Kehutanan	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	250.000.000	1000	300.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				434.941.906		400.000.000		300.000.000		650.000.000		1.000.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1	1	434.941.906	1	400.000.000	1	300.000.000	1	650.000.000	1	1.000.000.000	Dinas Kehutanan	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	100.000.000	1000	250.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				100.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	100.000.000	1000	250.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				-		-		-		-		-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	UPTD KPHP Kerinci Unit I	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	300.000.000	26.52	450.000.000	29.54	500.000.000	32.57	500.000.000	35.61	500.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.05.1.01.0004 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16	300.000.000	10.76	450.000.000	12.35	500.000.000	13.94	500.000.000	15.54	500.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48		26.52		29.54		32.57		35.61		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	300.000.000	26.52	450.000.000	29.54	500.000.000	32.57	500.000.000	35.61	500.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	300.000.000	26.52	450.000.000	29.54	500.000.000	32.57	500.000.000	35.61	500.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	300.000.000	26.52	450.000.000	29.54	500.000.000	32.57	500.000.000	35.61	500.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16	300.000.000	10.76	450.000.000	12.35	500.000.000	13.94	500.000.000	15.54	500.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48		26.52		29.54		32.57		35.61		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16	300.000.000	10.76	450.000.000	12.35	500.000.000	13.94	500.000.000	15.54	500.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48		26.52		29.54		32.57		35.61		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	300.000.000	26.52	450.000.000	29.54	500.000.000	32.57	500.000.000	35.61	500.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48	300.000.000	26.52	450.000.000	29.54	500.000.000	32.57	500.000.000	35.61	500.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16		10.76		12.35		13.94		15.54		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver	6.57	9.16	300.000.000	10.76	450.000.000	12.35	500.000.000	13.94	500.000.000	15.54	500.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya	18.56	23.48		26.52		29.54		32.57		35.61		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				300.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	



DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1244	1000	50.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan				-		-		-		-		-	UPTD Tahura	
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				274.542.950		400.000.000		440.000.000		460.000.000		500.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis	0.19	0.37	274.542.950	0.47	400.000.000	0.57	440.000.000	0.68	460.000.000	0.78	500.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				274.542.950		400.000.000		440.000.000		460.000.000		500.000.000	Dinas Kehutanan	
Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	35	35	274.542.950	35	400.000.000	35	440.000.000	35	460.000.000	35	500.000.000	Dinas Kehutanan	
3.28.06.1.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				274.542.950		400.000.000		440.000.000		460.000.000		500.000.000	Dinas Kehutanan	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	35	35	274.542.950	35	400.000.000	35	440.000.000	35	460.000.000	35	500.000.000	Dinas Kehutanan	

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi. - Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara. - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL). - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara. - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan	



			Kawasan Hutan. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). - Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun. - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi - Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi Perbenihan Tanaman Hutan - Sertifikasi Sumber Benih - Sertifikasi Mutu Benih - Sertifikasi Mutu Bibit - Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit - Pembangunan Sumber Benih - Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan.	
2.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi - Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem	



			Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi. - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi - Perencanaan Pengelolaan TAHURA - Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi - Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi - Penataan kawasan Tahura Provinsi	
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan - Penyiapan Perhutanan Sosial - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. - Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS.	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan menuju madya	%	20,52	23,48	26,52	29,54	32,57	35,61
2	Persentase peningkatan kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial menuju silver	%	7,57	9,16	10,76	12,35	13,94	15,54
3	Persentase peningkatan tutupan lahan kritis	%	0,27	0,37	0,47	0,57	0,68	0,78

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan taman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	73,00	73,27	73,82	74,37	74,92	75,46	
2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB daerah	%	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	
3.	Persentase Luas Lahan kritis yang di rehabilitasi.	%	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 untuk menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. RENSTRA diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan dan merupakan awal dari proses akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Keberhasilan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi **"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAH SWT"** akan sangat perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari segala sektor, konsistensi dalam kebijakan dan implementasi serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif sehingga pada akhirnya visi Jambi MANTAP dapat tercapai.



2025

H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP.197111292000031002

“GAGAL DALAM MERENCANAKAN ADALAH MERENCANAKAN KEGAGALAN”

“RENCANA YANG PALING BAIK ADALAH RENCANA YANG ALLAH SWT TENTUKAN UNTUK HAMBANYA”



DAN BERENCANALAH KALIAN, ALLAH MEMBUAT RENCANA,
DAN ALLAH SEBAIK- BAIK PERENCANA
(ALI IMRAN : 54)